

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 19 Januari 2011

Subyek : Lumpur Laoindo

Hal : 22

LUMPUR LAPINDO Menggantung, Nasib Warga di Luar Peta

SIDOARJO, KOMPAS - Nasib warga di luar peta terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, masih menggantung. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berharap Presiden segera membuat payung hukum bagi penanganan warga di luar peta terdampak. Sebab, bantuan sosial kepada warga akan habis tahun ini.

Pengamatan di lapangan pada Selasa (18/1), kondisi paling parah terlihat di sembilan rukun tetangga (RT) di tiga desa, yaitu Desa Siring di sisi barat Jalan Raya Porong, Desa Jatirejo di Kecamatan Porong, serta Desa Mindi di Kecamatan Jabon.

Ada 70 titik semburan gas dan lumpur di tiga desa itu. Air sumur juga tidak layak pakai dan tanahnya rawan ambles. Sudah ada tiga rumah ambles sejak 2007.

Sebanyak 2.100 jiwa di tiga desa itu mendapat bantuan sosial dari pemerintah, Juli 2009. Namun, bantuan seperti jatah hidup Rp 300.000 per jiwa per bulan selama enam bulan, uang evakuasi Rp 500.000 per keluarga, habis pada tahun 2009. Adapun, kontrak rumah dua tahun senilai Rp 2,5 juta per keluarga akan berakhir pertengahan tahun ini.

Menurut staf Humas BPLS Akhmad Kusairi di Sidoarjo, terkait selesainya pemberian bantuan sosial bagi warga di sembilan RT, pihaknya belum memiliki rencana apakah mereka akan menerima bantuan sosial lagi. Padahal, kondisi di tiga desa itu sudah tidak layak huni.

Kusairi berharap, Presiden segera mengeluarkan payung hukum untuk mempertegas nasib warga wilayah itu. Apakah akan direlokasi atau dimasukkan ke dalam peta terdampak lumpur.

"Kami tidak bisa bertindak tanpa ada payung hukum dari Presiden," kata Kusairi.

Selain warga di sembilan RT di Desa Siring, Jatirejo, dan Mindi, masih ada 45 RT yang terbagi di Desa Mindi (18 RT) dan Desa Besuki (7 RT) di Kecamatan Jabon, Desa Ketapang (12 RT) dan Desa Pamotan (8 RT) di Kecamatan Tanggulangin, yang juga memerlukan penanganan meski belum separah sembilan RT di tiga desa. Hal itu berdasarkan usulan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Di 45 RT juga terdapat semburan gas. Mereka juga perlu penanganan karena letaknya berdekatan dengan tanggul kolam penampungan lumpur," kata dia.

Nur Hadi (50), warga Desa Mindi, mengatakan, walau rumahnya berada di luar peta, namun jarak antara rumah dan tanggul kolam penampungan lumpur hanya sekitar 20 meter. Air sumur di tempatnya tidak bisa dipakai lagi karena berbau gas dan bercampur lumpur. Yang paling ia khawatirkan adalah letak rumah sangat berdekatan dengan tanggul kolam penampungan lumpur.

"Belakang rumah kami langsung berbatasan dengan tanggul kolam lumpur. Bagaimana jika sewaktu-waktu tanggul jebol? Pemerintah harus segera memutuskan nasib kami," kata Nur.

Kondisi serupa dialami Umi Salbiyah (60), warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Walau rumahnya berada di luar peta, kondisinya tidak layak huni. Selain air sumur kotor dan tidak dapat dimanfaatkan, beberapa bagian rumahnya sudah retak-retak dan rawan ambles. Ia tidak memiliki rencana mengungsi karena tidak ada biaya dan tempat tinggal lain.

Jika wilayah yang tidak layak huni itu dimasukkan ke dalam peta terdampak, maka mereka akan mendapat ganti rugi dari pemerintah. Ganti rugi berupa pembelian tanah pekarangan seharga Rp 1 juta per meter persegi, tanah sawah Rp 120.000 per meter persegi, dan bangunan Rp 1,5 juta per meter persegi. Seluruh biaya tersebut dari APBN melalui BPLS. (APO)